JURNAL PELAYANAN PUBLIK
ISSN : 3063-3281
Vol. 3, No. 3, 2026

PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SUMANGGI KECAMATAN BATANG ALAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Monawarah[1], Irza Setiawan[2] Agus Surya Dharma[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: monamonawarah047@gmail.com

ABSTRAK

Tata kelola limbah domestik di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terpantau belum berjalan optimal akibat rendahnya kepedulian masyarakat yang masih terbiasa membakar sampah atau membuangnya langsung ke aliran sungai. Hambatan serius ini kian diperparah oleh lumpuhnya sistem pengangkutan serta ketiadaan personel kebersihan khusus. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini memotret dinamika lapangan secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sebelas informan terpilih, dengan validitas data yang diuji melalui teknik triangulasi. Hasil riset mengonfirmasi adanya disfungsi menyeluruh pada setiap lini fungsi manajemen desa. Di sektor perencanaan dan pengorganisasian, absennya standar operasional prosedur (SOP) baku serta struktur formal memicu ketidakpastian kerja. Sementara pada tahap eksekusi dan pengawasan, pelayanan tidak mampu menjangkau seluruh wilayah lantaran keterbatasan armada Viar serta minimnya wadah penampungan resmi. Masalah krusial ini dipicu oleh benturan prioritas anggaran operasional desa yang mengakibatkan kelangkaan infrastruktur Tempat Pembuangan Sampah (TPS), sehingga warga terpaksa mengambil jalan pintas yang merusak kelestarian alam sekitar. Demi mengatasi krisis ekologis ini, aparat pemerintah desa direkomendasikan segera merumuskan regulasi tertulis, melengkapi sarana armada pendukung, membentuk tim pengelola yang solid, serta rutin mengedukasi warga guna membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan demi masa depan kehidupan masyarakat desa yang jauh lebih sehat.

Kata Kunci: Tata Kelola Limbah, Fungsi Manajemen, Desa Sumanggi

ABSTRACT

Domestic waste management in Sumanggi Village, North Batang Alai District, Central Hulu Sungai Regency, has been observed to be suboptimal due to a lack of community awareness, which still tends to burn waste or dump it directly into rivers. This serious obstacle is further exacerbated by the paralyzed transportation system and the lack of dedicated cleaning personnel. Using a descriptive qualitative approach, this study captured in-depth field dynamics through observation, interviews, and documentation with eleven selected informants, with data validity tested through triangulation techniques. The research results confirmed a comprehensive dysfunction at every level of village management. In the planning and organization sectors, the absence of standard operating procedures (SOPs) and formal structures fueled job uncertainty. Meanwhile, in the execution and supervision stages, services were unable to reach all areas due to limited Viar fleets and a lack of official waste collection facilities. This crucial problem was triggered by conflicting village operational budget priorities, resulting in a shortage of Waste Disposal Site (TPS) infrastructure, forcing residents to take shortcuts that damage the sustainability of the surrounding environment. To address this ecological crisis, village government officials are recommended to immediately formulate written regulations, equip supporting facilities, establish a solid management team, and regularly educate residents to build collective awareness of maintaining a clean environment sustainably for a much healthier future for the village community.

Keywords: *Waste Management, Management Function, Sumanggi Village*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik dalam sektor penataan ekosistem, khususnya tata kelola persampahan, merepresentasikan pilar krusial pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan bagi hajat hidup masyarakat. Problematika ini tidak sekadar berpijak pada dimensi higienitas semata, melainkan berimplikasi langsung terhadap derajat kesehatan publik, proteksi kelestarian alam, serta eskalasi mutu kehidupan secara holistik. Di bumi Nusantara, polemik mengenai residu material ini kian pelik akibat laju produksinya yang terus meroket secara eksponensial, yang ironisnya berjalan beriringan dengan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap konsekuensi ekologis yang ditimbulkan. Pembiaran terhadap penumpukan sisa konsumsi ini memicu aneka dampak destruktif, mulai dari degradasi lingkungan, transmisi penyakit menular, friksi sosial di tengah komunitas, hingga membengkaknya kebutuhan alokasi lahan serta anggaran operasional. Sebagai wujud tanggung jawab, pemerintah berupaya menginisiasi penyediaan infrastruktur seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) beserta perangkat penyokongnya demi menekan dampak buruk ekologis. Kendati demikian, efektivitas sistem ini tidak semata-mata bergantung pada aspek ketersediaan fisik, melainkan sangat dipengaruhi oleh pola perilaku sosiologis warga dan ketepatan eksekusi di lapangan. Anomali nyata ini terpotret jelas di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana diskrepansi antara regulasi normatif dan fakta empiris masih menganga lebar. Padahal secara legal formal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 telah menggariskan mandat mutlak bagi jajaran otoritas bersama masyarakat untuk mengoordinasikan pengangkutan, memfasilitasi sarana fisik, serta menumbuhkan partisipasi publik secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Ketidakoptimalan eksekusi kebijakan di wilayah Desa Sumanggi terejawantah secara transparan melalui tiga fenomena krusial yang mencakup hambatan kultural maupun struktural. Manifestasi pertama dicirikan oleh bertahannya pola perilaku konvensional warga yang gemar membuang limbah domestik langsung ke aliran sungai serta melakukan pembakaran terbuka di pekarangan rumah. Aktivitas minor tersebut secara telak mencederai amanat Perda Nomor 10 Tahun 2013 yang mengharamkan pembuangan residu di luar zona resmi serta menentang prinsip tata kelola berwawasan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 demi melindungi kesehatan publik. Fenomena berikutnya ditandai oleh mandeknya operasionalisasi pengangkutan sampah berkala, padahal instrumen pendukung berupa kendaraan roda tiga (viar) serta bak penampungan telah didistribusikan oleh pemerintah daerah. Ketiadaan sistem tata laksana kerja yang konsisten memicu kegagalan fungsi sarana ini, yang secara yuridis melanggar kewajiban pemerintah daerah dalam mobilisasi sampah dari TPS menuju TPA serta pemeliharaan sarana pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam regulasi lokal. Kelumpuhan ini diperparah oleh fenomena ketiga, yakni absennya personel penanggung jawab khusus yang ditugaskan mengelola kebersihan desa. Ketiadaan alokasi sumber daya manusia yang fokus pada aspek operasional menyebabkan roda pelayanan kebersihan desa tidak berjalan semestinya, sehingga mendorong warga mengambil jalan pintas destruktif yang menyimpang dari koridor hukum. Kondisi ini mencerminkan betapa lemahnya implementasi kebijakan publik di tingkat lokal, bahkan program daerah seperti Surung Sintak belum mampu menjembatani gap sektoral akibat lemahnya konsistensi pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat. Mengurai benang kusut persampahan di tingkat desa membutuhkan integrasi antara pendekatan struktural melalui pengadaan fasilitas fisik dengan pendekatan sosial berbasis pemberdayaan kolektif serta penguatan tata kelola pemerintahan desa. Di sinilah urgensi konsep innovative governance atau tata kelola inovatif hadir sebagai instrumen

strategis guna merancang sistem yang lebih adaptif, responsif, serta kolaboratif antarsektor demi mengatasi problem persampahan. Efektivitas tata kelola ini bertumpu pada adopsi prinsip manajemen esensial, yang secara terminologi bermakna seni mengatur, mengendalikan, mengarahkan, merencanakan, dan menakhodai suatu organisasi demi mencapai target kolektif. Sebagaimana dikutip dalam tulisan Jer Nov Pratama, manajemen berfungsi sebagai disiplin ilmiah yang memandu manusia mendayagunakan seluruh aset organisasi secara sinergis. Proses ini melibatkan rangkaian sirkular yang terencana, terarah, dan terkendali demi menjamin efektivitas serta efisiensi kinerja institusi. Lebih lanjut, Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i (2016:14) menguraikan bahwa akar kata manajemen berasal dari to manage yang melibatkan pemecahan masalah krusial seputar objek yang diatur, subjek pengatur, alasan pengaturan, serta sasaran dari aktivitas pengaturan itu sendiri. Penyelarasan potensi insani ini sejalan dengan pandangan Lijan Sinambela (2016:7-8) yang mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai skema komprehensif mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, pemberian balas jasa, dan pemisahan tenaga kerja demi mewujudkan cita-cita institusi secara paripurna. Merujuk pada kontribusi pemikiran George R. Terry (2021:3), manajemen diposisikan sebagai sebuah proses distingtif yang merangkum tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, hingga pengawasan demi merealisasikan sasaran organisasi via optimalisasi SDM dan sumber daya lainnya. Menurut Athoillah (2017:1), tata laksana ini pada dasarnya berorientasi pada proses kolektif yang melibatkan kepemimpinan dan pengendalian yang di dalamnya terdapat upaya sadar para anggota. Dalam mahakaryanya mengenai pilar-pilar manajerial, Terry (2021:7-8) mengelompokkan instrumen tersebut ke dalam empat pilar fungsional yang dikenal sebagai POAC. Pilar pertama ialah perencanaan (planning), sebuah aktivitas determinatif untuk menetapkan tujuan, memilih fakta, memproyeksikan asumsi masa depan, menyusun program kerja, serta merumuskan langkah taktis guna meraih capaian spesifik. Sukarna (2011:10) memerinci langkah dasar planning ini ke dalam empat tahapan logis, meliputi penetapan seperangkat sasaran, identifikasi realitas situasi terkini, pemetaan faktor pendorong dan penghambat, serta formulasi tindakan nyata. Pilar kedua merupakan pengorganisasian (organizing), yang diartikan sebagai proses mendistribusikan tugas, mengelompokkan beban kerja, mengumpulkan aset, serta melekatkan otoritas formal kepada aparatur pelaksana sehingga terwujud kesatuan usaha. Sukarna (2011:38-46) menambahkan bahwa organizing menghendaki kepatuhan terhadap lima asas utama: penetapan tujuan (the objective), pembagian departemen kerja (departementation), penempatan personel yang proporsional (assign the personnel), pembatasan wewenang-tanggung jawab (authority and responsibility), serta pendelegasian kekuasaan (delegation of authority) agar tercipta sinergi operasional yang padu. Pandangan ini selaras dengan Anton Athoillah (2013:96) yang menegaskan bahwa pengorganisasian mengintegrasikan hubungan kerja secara harmonis dan kooperatif. Dua pilar pelengkap dalam konsepsi George R. Terry adalah penggerakan (actuating) dan pengawasan (controlling) yang memegang peranan vital dalam menjamin keberlanjutan program di lapangan. Actuating berfokus pada dorongan psikologis dan motivasional agar seluruh elemen organisasi bersedia bekerja keras secara ikhlas dan sadar demi menyukseskan visi bersama yang tertuang dalam planning dan struktur organisasi. Sukarna (2011:82-83) menegaskan bahwa penggerakan tanpa fondasi planning yang matang tidak akan membuahkan efektivitas sebab perencanaan menyediakan parameter krusial seperti anggaran, standar baku, metode kerja, serta prosedur operasional. Dinamika penggerakan ini membutuhkan sokongan variabel kunci seperti kepemimpinan (leadership), moral kerja (attitude and morale), tata hubungan komunikasi (communication), insentif (incentive), supervisi melekat (supervision), serta disiplin (discipline). Sementara itu, controlling bertindak

sebagai instrumen evaluatif untuk memantau keselarasan antara realitas kerja dengan target awal guna mendeteksi penyimpangan lebih dini. Sukarna (2011:110) memaparkan empat koridor sistematis dalam pengawasan: penentuan standar baku (determining the standard), pengukuran performa riil (measuring performance), komparasi deviasi antara kinerja dengan standar (comparing performance), serta eksekusi tindakan korektif yang responsif (correcting deviation). Sebagaimana diulas oleh Abd. Rohman (2017:20), fungsi controlling ini memiliki urgensi yang setara dengan planning, mengingat hasil evaluasi berkala akan bertindak sebagai landasan utama penyusunan rencana jangka panjang berikutnya. Sistem ini, menurut Anton Athoillah (2013:96), dapat dikembangkan baik secara vertikal maupun horizontal lewat sistem pengawasan melekat yang menitikberatkan kesadaran personal. Implementasi manajemen persampahan yang kokoh menuntut pemahaman konseptual yang jernih mengenai karakteristik objek yang dikelola oleh pemangku kebijakan. Secara umum, sampah dimaknai sebagai seluruh material sisa yang tidak diinginkan, tidak disenangi, tidak memiliki nilai ekonomis instan, serta dibuang dari dinamika aktivitas domestik manusia, industri, pertambangan, pertanian, maupun siklus alami. Menurut terminologi Sangkapura yang dikutip oleh Ruth dan Dewi (2020:6), sampah merupakan residu semi padat atau padat hasil aktivitas manusia yang terbagi atas unsur organik yang mudah mengurai biologis (sampah basah) dan unsur anorganik yang resisten terhadap dekomposisi alam (sampah kering). Penanganan entitas ini wajib diintegrasikan secara sistematis sejak dari hulu hingga hilir, mencakup alur pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, hingga pemusnahan akhir sebagaimana ditegaskan oleh Sahil dkk (2016). Menilik klasifikasi yang dirumuskan oleh Ramadhani (2015), pasokan limbah padat ini bersumber dari berbagai klaster utama, yakni permukiman warga (domestic waste) berupa sisa makanan dan plastik pembungkus, fasilitas publik seperti pasar dan terminal, kawasan perkantoran komersial dan pendidikan, hingga material pembersihan jalan raya seperti debu dan dedaunan. Berdasarkan sifat bawaannya, jenis sampah dipilah menjadi kategori organik basah, anorganik kering seperti kaleng dan styrofoam yang memerlukan pemrosesan khusus, serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berasal dari aktivitas medis rumah sakit maupun limbah pabrik industri. Aktivitas tata kelola sampah didefinisikan sebagai rangkaian pengendalian integral yang melibatkan pertimbangan aspek kesehatan publik, efisiensi teknologi, regulasi ekonomi, kelestarian estetika, serta respons sosiologis masyarakat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karya Petir Salim dan Yenny Salim (2002:695), akar kata pengelolaan merepresentasikan tindakan memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan menyempurnakan suatu objek agar menjadi lebih maju dan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pandangan ini bersesuaian dengan Arikonto (1993) yang menyamakan pengelolaan dengan manajemen sebagai suatu proses pengaturan, pengurusan, dan pengambilan keputusan sumber daya manusia, informasi, finansial, dan fisik. Syamsir Torang (2013:112) yang mengutip pemikiran George R. Terry menambahkan bahwa pengelolaan mencakup proses manajerial khas yang mengombinasikan potensi insani dengan instrumen non-insani. Kuncoro Sejati (2009:24-25) membagi fase penanganan ini dari hulu, dimulai dari penimbulan yang dipengaruhi pola konsumsi, dilanjutkan penanganan di tempat (on site handling) berupa pemilahan (sorting), penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle) demi mereduksi beban residu sebelum dikirim ke TPA. Pada tatanan operasional pemukiman, Taufiqurrahman (2016:33-35) memerinci tiga pilar teknis mutlak. Pertama, pewadahan mandiri menggunakan kantong plastik atau kontainer oleh warga; kedua, pengumpulan logistik dari sumber menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS); serta ketiga, pengangkutan terjadwal menggunakan armada angkutan seperti truk menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Upaya pembenahan manajemen persampahan ini pada hakikatnya bermuara pada perlindungan ruang hidup atau stabilitas lingkungan global. Berdasarkan

diktum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan ditafsirkan sebagai kesatuan ruang spasial beserta seluruh materi, energi, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dengan perilakunya yang saling memengaruhi kelangsungan hidup. Suryani dkk (1986) menambahkan bahwa ilmu lingkungan berperan sebagai ekologi terapan yang mendalami posisi strategis manusia di dalam jaring ekosistem demi menjaga stabilitas kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. Kegagalan mengelola residu akan berujung pada kerusakan lingkungan yang menurunkan daya dukung alam secara permanen sehingga kurang berfungsi menopang pembangunan. Di level pedesaan seperti Desa Sumanggi, implementasi cita-cita ekologis ini kerap membentur realitas dilematis akibat problem sarana prasarana. Hakikiah (2024) menyoroti bahwa keterbatasan fasilitas fisik, kurangnya staf operasional, dan rendahnya partisipasi komunitas merupakan penghambat utama dalam tata kelola berbasis warga yang memicu munculnya tempat pembuangan liar. Wafa dan Angin (2024) mengimbuhkan bahwa penyediaan anggaran memadai serta regulasi yang tegas menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program. Sebaliknya, Nasihin dkk (2023) mengingatkan bahwa absennya sosialisasi masif dan edukasi berkala akan menjadi faktor penghambat dominan yang memicu maraknya perilaku pembuangan sampah sembarangan.

METODE

Lokus penelitian ini ditetapkan secara sengaja di kawasan domestik Desa Sumanggi, yang secara administratif berada di bawah payung Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penetapan bentang geografis ini didasari oleh realitas empiris mengenai carut-marut tata kelola limbah domestik yang krusial, seperti kebiasaan kronis masyarakat yang melarung sampah ke aliran sungai, aktivitas pembakaran terbuka yang memicu polusi udara, tidak berjalannya fasilitas penunjang kebersihan secara optimal, hingga absennya petugas pengangkut sampah reguler. Kendati desa ini sebenarnya telah disuntik stimulus berupa sarana pengelolaan limbah oleh pemerintah daerah, utilitas infrastruktur tersebut justru terbengkalai tanpa pengelolaan yang terstruktur, sehingga melahirkan urgensi akademik yang menantang untuk diinvestigasi. Melalui landasan tersebut, pemilihan ruang spasial ini dinilai sangat representatif untuk memotret potret makro problematika tata kelola ekosistem persampahan di tingkat pedesaan secara objektif dan mendalam.

Guna mengupas tuntas fenomena sosial ini, peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif yang mengedalamkan pemahaman holistik terhadap konstruksi sosial berdasarkan sudut pandang para aktor di lapangan. Pilihan metodologis ini berpijak pada pemikiran Creswell (2021:45) yang menegaskan bahwa investigasi kualitatif difungsikan secara spesifik untuk mengeksplorasi serta mengartikulasikan esensi makna yang dilekatkan oleh individu atau kelompok terhadap suatu problem kemanusiaan atau sosial yang kompleks. Urgensi penggunaan pendekatan ini sangat beralasan karena perkara tata limbah di kawasan ini tidak sekadar bertumpu pada dimensi mekanis-teknis semata, melainkan berkelindan erat dengan habituasi kultural masyarakat, efektivitas kebijakan birokrasi pemerintahan desa, serta konfigurasi sosiologis yang melingkupinya. Data yang dihimpun sengaja tidak dikuantifikasi, melainkan diwujudkan dalam bentuk deskripsi tekstual, transkrip verbal, tindakan aktual, dan rekaman visual yang diurai secara mendalam guna menyajikan pemahaman yang komprehensif tanpa reduksi kontekstual.

Selaras dengan corak teoretis di atas, jenis penelitian yang diimplementasikan dalam riset ini adalah deskriptif kualitatif, sebuah rancangan yang berorientasi pada pemaparan sistematis, faktual, dan akurat mengenai potret riil fenomena di area kajian. Merujuk pada formulasi Sugiyono (2022:213), studi deskriptif kualitatif tidak dirancang untuk menguji validitas hipotesis statistik melalui rumus matematis, melainkan ditekankan pada upaya menginterpretasikan situasi kontekstual berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan secara alamiah. Melalui koridor metodologis ini, peneliti

berupaya membedah mekanisme operasional tata kelola sampah yang tengah berjalan di Desa Sumanggi sembari mengidentifikasi variabel-variabel penghambat maupun pendukung yang memengaruhi dinamika tersebut. Orientasi akhir dari corak deskriptif ini adalah melahirkan sebuah narasi akademik yang jernih, utuh, dan terstruktur mengenai potret makro maupun mikro tata laksana lingkungan hidup di lokasi penelitian.

Konstruksi data riset ini ditopang oleh dua poros utama, di mana poros pertama bersumber dari data primer yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama di lapangan melalui interaksi intensif. Menurut perspektif Sugiyono (2022:104), data primer memanifestasikan informasi autentik yang digali langsung dari subjek penelitian yang memiliki relevansi fungsional dengan substansi yang diteliti. Pengumpulan materi primer ini menyasar sebelas informan kunci yang dipilih lewat teknik penarikan sampel bertujuan atau purposive sampling, guna menjamin bobot akurasi informasi dari para pemangku kebijakan dan warga setempat. Adapun konfigurasi informan tersebut meliputi jajaran birokrasi desa yaitu Muhammad Fauzi selaku Kepala Desa, Muhammad Fuziarto selaku Sekretaris Desa, dan Mukeran selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Komponen operasional diwakili oleh dua petugas kebersihan lapangan yakni Muhammad Arifin dan M. Fauzi, sementara representasi kultural dan sosial melibatkan tokoh masyarakat seperti Darmansyah dan Abdullah, serta didukung oleh elemen warga sipil langsung yang terdiri atas Herliani, Novella, Mariana, dan Wartinah.

Sebagai pilar penguat, peneliti mengintegrasikan data sekunder yang berfungsi mengompilasi informasi tidak langsung dari aneka khazanah dokumenter literatur yang telah mapan dan tervalidasi. Sugiyono (2022:106) menegaskan bahwa instrumen sekunder memegang peranan krusial sebagai elemen penunjang eksternal yang berguna memperkokoh substansi data primer serta meminimalkan bias subjektivitas dalam analisis kualitatif. Dalam konteks operasional riset ini, pasokan data sekunder diekstraksi dari arsip monografi pemerintahan desa, laporan berkala Dinas Lingkungan Hidup, serta payung regulasi formal yang meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020. Peneliti juga memperluas rujukan dengan membedah artikel jurnal bereputasi, buku teks ilmiah, dan tesis terdahulu untuk mengukuhkan bangunan teoretis serta melakukan konvergensi data atau triangulasi, sehingga konklusi akhir studi ini memiliki derajat validitas akademik yang kokoh.

Guna menjembatani abstraksi teoretis dengan realitas empiris di lapangan, disusunlah sebuah desain operasional penelitian yang menerjemahkan konsep makro ke dalam indikator praktis yang terukur secara naratif. Paradigma operasional ini bersandar pada teori manajemen klasik George R. Terry (2021:7-8) yang membagi fungsi manajerial ke dalam empat pilar utama, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam bingkai partisipasi publik. Pada dimensi perencanaan, indikator difokuskan pada ketersediaan cetak biru rencana kerja tertulis serta standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan limbah, sementara dimensi pengorganisasian menguliti aspek pembagian instruksi kerja serta kejelasan bagan tata struktur kelembagaan desa. Selanjutnya, pilar pelaksanaan diturunkan menjadi indikator pengoptimalan tata cara pengumpulan, pemilahan, dan pengangkutan sampah di lapangan, sedangkan pilar pengawasan didasarkan pada mekanisme monitoring terhadap kinerja petugas kebersihan serta evaluasi komparatif atas pergeseran sikap dan perilaku higienitas masyarakat desa dalam menjaga kelestarian ekologis lingkungan mereka.

Aktivitas penghimpunan data di lapangan dikonstruksikan melalui sinergi tiga metode konvensional yang berjalan simultan, yaitu observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam, dan telaah dokumentasi guna merealisasikan prinsip triangulasi metode. Merujuk pada pandangan Sugiyono (2022:320), pemanfaatan multi-teknik ini bertujuan menghalau bias informasi dan menjamin kedalaman data kualitatif yang diperoleh. Langkah observasi diterapkan secara visual untuk merekam potret riil degradasi lingkungan, seperti titik-titik pembakaran liar dan tumpukan limbah di bantaran sungai, di mana Creswell (2021:120) berpendapat bahwa pengamatan langsung

memberikan pemahaman kontekstual yang tidak dimanipulasi. Wawancara mendalam dikerjakan secara dialogis dan fleksibel bersama Kepala Desa Muhammad Fauzi beserta sepuluh informan lainnya guna menguak motif, hambatan struktural, dan ekspektasi warga, sementara metode dokumentasi difungsikan menangkap rekaman fotografis sarana fisik dan menelaah berkas regulasi lokal sebagai bukti autentik yang melengkapi narasi hasil wawancara.

Fase krusial analisis data dalam riset ini mengadopsi model interaktif siklikal dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014:31) yang memproses data secara simultan melalui tiga tahapan utama: reduksi data untuk menyaring materi mentah, penyajian data dalam deskripsi naratif linier, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi berkelanjutan. Paralel dengan proses analisis tersebut, standardisasi keabsahan temuan dipastikan melalui uji kredibilitas data yang ketat mengacu pada petunjuk Sugiyono (2022:360) melalui empat sumbu validasi kualitatif. Pertama, dilaksanakan triangulasi sumber dan teknik guna mengomparasikan konsistensi pernyataan antar-informan dengan bukti fisik, dilanjutkan perpanjangan waktu pengamatan di Desa Sumanggi demi mengeliminasi distorsi informasi temporal. Langkah ketiga ditempuh melalui peningkatan ketekunan berupa pengamatan mendalam yang konsisten terhadap habitus warga, dan diakhiri dengan proses member check untuk mengonfirmasi ulang draf transkrip wawancara kepada pihak-pihak terkait guna menjamin bahwa narasi ilmiah yang ditulis murni merepresentasikan kebenaran teoretis dan empiris tanpa manipulasi subjektif.

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Sampah Di Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Perencanaan

a. Rencana Kerja

Sebuah cetak biru atau peta jalan strategis sangat krusial dalam memandu arah, sasaran, serta tahapan manajemen limbah pada periode tertentu. Dokumen ini idealnya merinci distribusi anggaran, penyediaan fasilitas, target reduksi volume limbah, hingga distribusi tanggung jawab lintas sektor agar program dari hulu ke hilir berjalan konsisten dan tidak bersifat reaktif. Namun, kondisi di Desa Sumanggi menunjukkan bahwa manajemen persampahan belum terstruktur dengan baik akibat ketiadaan regulasi tertulis dan rancangan yang matang dari pemerintah domestik. Dampaknya, mekanisme operasional di lapangan menjadi tidak jelas, di mana penanganan limbah masih bertumpu pada inisiatif mandiri warga atau agenda gotong royong yang insidental. Kendala ini diperparah oleh minimnya sumber daya manusia, mengingat belum ada petugas sanitasi khusus pemukiman; personel yang tersedia saat ini hanya berfokus pada area formal seperti kantor desa dan rumah ibadah.

Realitas yang terjadi di lapangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata dengan konsep dasar administrasi. Fenomena ini tidak sejalan dengan gagasan yang diutarakan oleh George R. Terry (2021:7-8) dalam literaturnya mengenai asas-asas pengelolaan, yang menegaskan bahwa perencanaan merupakan proses menetapkan sasaran sekaligus merumuskan serangkaian aktivitas yang wajib diwujudkan pada masa mendatang. Tanpa adanya dokumen perencanaan yang autentik dan berkekuatan hukum, tata kelola limbah di Desa Sumanggi akan terus kehilangan arah dan terjebak dalam pemborosan anggaran. Oleh sebab itu, urgensi penyusunan rencana kerja formal menjadi fondasi utama yang tidak boleh diabaikan demi menciptakan sistem lingkungan yang bersih, teratur, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat desa.

b. SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) berfungsi sebagai pedoman tertulis yang mengatur teknis pelaksanaan di lapangan agar seluruh aktivitas kerja berlangsung konsisten, aman, dan efisien. Jika rencana strategis menetapkan target, maka SOP

menjabarkan langkah demi langkah untuk mewujudkannya, mulai dari jadwal pemilahan, mekanisme pengangkutan, hingga aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sayangnya, tata kelola limbah di Desa Sumanggi belum berjalan optimal karena pemerintah domestik belum menyusun regulasi teknis maupun jadwal pengangkutan yang baku. Kondisi ini kian memprihatinkan akibat keterbatasan fasilitas penunjang yang hanya mengandalkan kisaran 100 unit tempat sampah dan satu buah armada motor roda tiga. Keterbatasan daya jangkau armada tersebut memicu penumpukan sisa buangan di area hunian warga, sehingga aktivitas pengumpulan hingga pembuangan akhir terkesan dilakukan secara darurat, acak, serta tidak berkala.

Ketidakjelasan sistem operasional dan keterbatasan sarana ini jelas bertolak belakang dengan asas tata kelola yang ideal. Fenomena tersebut tidak selaras dengan teori dari George R. Terry (2021:7-8) dalam bukunya mengenai prinsip-prinsip manajemen, yang memaparkan bahwa perencanaan melibatkan proses penetapan tujuan sekaligus perumusan tindakan yang ingin diraih di masa depan. Mengonsepkan rancangan tersebut berarti mempersiapkan segala elemen kebutuhan serta memformulasikan pelaksanaan agenda demi menggapai sasaran organisasi. Ketiadaan SOP tertulis dan minimnya inventarisasi alat di Desa Sumanggi membuktikan bahwa pemenuhan kebutuhan operasional belum dipersiapkan secara matang, sehingga memicu tumpang tindih fungsi di lapangan dan menurunkan standardisasi kebersihan pemukiman.

2. Pengorganisasian

a. Pembagian Tugas

Pembagian beban kerja merupakan metode pendistribusian tanggung jawab yang disesuaikan dengan kompetensi, ketersediaan waktu, rekam jejak, maupun preferensi anggota kelompok. Melalui kejelasan komunikasi dan pemahaman mendalam terhadap kapasitas personal, tumpang tindih peran atau kelalaian tugas dapat dihindari demi mencapai target kolektif secara optimal. Namun, observasi dan wawancara di Desa Sumanggi menunjukkan bahwa manajemen limbah domestik belum terstruktur dengan baik akibat absennya tenaga kebersihan khusus. Dampaknya, tidak ada batasan peran yang tegas antara aparatur desa, petugas, dan warga. Operasional kebersihan saat ini masih terbatas pada area perkantoran serta fasilitas ibadah, sementara penanganan sampah di kawasan hunian hanya bertumpu pada inisiatif pribadi dan agenda kerja bakti massal.

Kondisi tata kelola yang kurang terarah di wilayah tersebut mengindikasikan belum terciptanya sistem yang padu. Realitas di lapangan ini dinilai belum sejalan dengan konsep yang digagas oleh George R. Terry (2021:7-8) dalam bukunya mengenai asas-asas manajemen. Beliau menegaskan bahwa pengorganisasian esensinya merupakan sebuah tahapan dalam menetapkan kewajiban, menghimpun seluruh potensi sumber daya yang ada, sekaligus mengklasifikasikan berbagai aktivitas demi merealisasikan rencana yang telah dicanangkan.

b. Struktur Organisasi

Bagan kelembagaan merupakan kerangka formal yang mengatur tata hubungan serta penugasan antar-unit kerja demi mewujudkan visi kolektif. Sistem operasional dinilai ideal jika setiap elemen mampu mengeksekusi fungsinya secara konsisten untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Kendati demikian, temuan investigasi dan dialog di Desa Sumanggi mengindikasikan bahwa tata kelola limbah di sana belum memiliki bagan kepengurusan yang baku serta sistematis. Akibatnya, fokus pelayanan kebersihan masih parsial, yakni hanya berpusat di area sekretariat desa dan lokasi peribadatan. Sementara itu, penanggulangan sampah di area permukiman warga justru terbengkalai dan hanya bersandar pada kesadaran mandiri atau agenda kerja bakti yang bersifat situasional.

Fenomena stagnasi ini menunjukkan bahwa tata laksana di lapangan belum mengadopsi prinsip manajerial yang komprehensif. Realitas tersebut dinilai belum selaras dengan perspektif George R. Terry (2021:7-8) dalam literatur prinsip-prinsip manajemen,

yang menerangkan bahwa aktivitas pengorganisasian merupakan rumpun proses yang mencakup penentuan bobot tugas, pengintegrasian seluruh aset atau sumber daya, serta pengkategorian jenis pekerjaan demi menyukseskan program kerja yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Sampah

Aktuasi atau penggerakan merupakan stimulan tindakan yang bertujuan mendorong seluruh elemen organisasi agar bersinergi secara mandiri maupun kolektif dalam merealisasikan target strategis. Namun, potret riil melalui wawancara dan pengamatan di Desa Sumanggi menunjukkan bahwa implementasi penanganan limbah domestik masih tersendat akibat minimnya infrastruktur dan keterbatasan personil. Saat ini, jangkauan operasional kebersihan sangat terbatas karena ditopang oleh seratus unit bak sampah dan satu armada kendaraan roda tiga (Viar). Absennya formasi pekerja kebersihan internal membuat tata laksana di lapangan berjalan parsial dan sepenuhnya bertumpu pada inisiatif swadaya warga.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa manajemen lapangan belum optimal dalam mengoordinasikan potensi yang ada. Ketimpangan ini dinilai belum sejalan dengan teori George R. Terry (2021:7-8) dalam buku prinsip-prinsip manajemen yang menegaskan bahwa pelaksanaan esensinya adalah upaya menggerakkan anggota kelompok demi meraih sasaran yang sinkron dengan perencanaan, termasuk di dalamnya aspek pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, pengarahan, bimbingan, serta pengembangan kompetensi tenaga kerja.

b. Pengoptimalan Kegiatan

Maksimisasi potensi atau pengoptimalan merupakan metode sistematis demi memilah jalan keluar paling ideal dari berbagai opsi, guna mencapai efisiensi tertinggi di tengah keterbatasan yang ada. Sayangnya, potret riil dari investigasi lapangan di Desa Sumanggi menunjukkan bahwa akselerasi tata kelola limbah belum berjalan mulus akibat defisit infrastruktur, nihilnya regulasi kepengurusan, serta absennya tenaga kebersihan khusus. Problem ini kian pelik lantaran rendahnya kepedulian warga dalam agenda penyuluhan maupun kerja bakti, ditambah belum adanya kesepakatan yang solid antara birokrasi desa dan masyarakat untuk menciptakan kawasan hunian yang higienis.

Hambatan dalam menggerakkan ekosistem desa ini mengindikasikan bahwa manajemen lapangan belum berjalan secara terpadu. Realitas tersebut dinilai belum selaras dengan tesis George R. Terry (2021:7-8) dalam literatur prinsip-prinsip manajemen, yang menekankan bahwa pelaksanaan tindakan semestinya mendorong seluruh anggota organisasi berjuang meraih target kolektif yang sinkron dengan perencanaan, termasuk memproyeksikan kebutuhan aparatur, memberikan pengarahan, pelatihan, serta pembinaan kapasitas tenaga kerja.

4. Pengawasan

a. Pengawasan Terhadap Petugas Kebersihan

Pengendalian atau pengawasan merupakan aktivitas korektif yang krusial untuk mengevaluasi dan membenahi output kerja yang melenceng dari standardisasi mutu. Kendati demikian, temuan empiris melalui wawancara dan pengamatan langsung di Desa Sumanggi mengindikasikan bahwa monitoring tata kelola limbah belum berjalan efektif. Lemahnya fungsi ini dipicu oleh nihilnya skema dan agenda supervisi yang baku, serta lokus pemantauan yang masih parsial di area balai desa dan fasilitas peribadatan semata. Terlebih lagi, belum adanya formasi internal untuk tenaga kebersihan khusus serta minimnya jumlah staf membuat proses peninjauan lapangan tidak dapat terlaksana secara sistematis, prima, maupun berkesinambungan.

Disorientasi dalam penegakan kepatuhan kerja ini mengonfirmasi adanya kesenjangan manajerial yang nyata di tingkat lokal. Realitas empiris tersebut dinilai belum sejalan dengan pemikiran George R. Terry (2021:7-8) dalam buku prinsip-prinsip

manajemen, yang menegaskan bahwa pengawasan sejatinya merupakan langkah pemungkas sekaligus fungsi penentu yang mutlak diperlukan dalam roda organisasi. Evaluasi berkala ini mengemban peran vital untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan searah dengan koridor aturan serta indikator capaian yang telah disepakati bersama.

b. Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan

Kepedulian terhadap sanitasi ruang publik dapat diwujudkan secara mandiri maupun kolektif oleh para pelaku pasar, termasuk komunitas pedagang. Manifestasi dari atensi tersebut akan melahirkan tindakan nyata yang bermakna sebagai bentuk kontribusi aktif dalam mempertahankan higienitas lingkungan. Merujuk pada data investigasi lapangan di Desa Sumanggi, respons dan dinamika perilaku kolektif warga sebetulnya tergolong memadai berkat tingginya animo masyarakat dalam agenda kerja bakti massal. Kendati demikian, konsistensi perilaku dalam aktivitas harian masih menghadapi hambatan serius karena belum meratanya edukasi personal. Hal ini tecermin dari eksistensi kebiasaan membuang limbah ke bantaran sungai, pembakaran terbuka, serta pembuangan sembarangan yang diperparah oleh minimnya infrastruktur penunjang.

Fluktuasi kedisiplinan ini mengindikasikan perlunya mekanisme monitoring yang lebih ketat agar pola hidup bersih warga tetap konsisten. Aspek penegakan kepatuhan ini dinilai selaras dengan konsep George R. Terry (2021:7-8) dalam literatur prinsip-prinsip manajemen, yang memaparkan bahwa pengawasan bertindak sebagai instrumen pemungkas dari seluruh rangkaian manajerial. Kehadiran kontrol atau penilaian performa secara periodik sangat mendasar dalam struktur organisasi masyarakat guna mengawal agar seluruh kebiasaan dan tindakan yang berjalan di lapangan senantiasa bersandar pada tolok ukur regulasi serta norma kebersihan yang berlaku.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Sampah Di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Keterbatasan sarana dan prasarana

Defisit infrastruktur fisik menjadi hambatan krusial yang melumpuhkan seluruh rantai tata kelola limbah. Temuan wawancara di Desa Sumanggi mengonfirmasi bahwa absennya Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan armada pengangkut memicu stagnasi distribusi pembuangan. Ketiadaan bak sampah terpilah bagi petugas serta minimnya tong sampah umum di kawasan hunian kian memperparah keadaan. Akibat keterbatasan fasilitas pendukung ini, masyarakat terpaksa mengambil jalan pintas dengan menerapkan metode penanganan yang tidak higienis, seperti pembakaran terbuka di pekarangan rumah serta membuang sisa domestik ke lahan kosong maupun aliran sungai.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana

Aspek tenaga kerja bertindak sebagai roda penggerak utama dalam operasional penanganan limbah domestik. Minimnya alokasi dana, stigma sosial, dan belum mapannya struktur organisasi tingkat lokal sering kali memicu kekosongan figur petugas kebersihan khusus. Temuan di Desa Sumanggi mengonfirmasi bahwa ketiadaan personil tetap ini melumpuhkan sistem tata kelola, sehingga pembersihan wilayah berjalan parsial dan terbatas pada area instansi atau tempat peribadatan saja. Tanpa adanya intervensi pengadaan pekerja khusus yang memiliki kejelasan tanggung jawab, ekosistem manajemen sampah akan terus berjalan sporadis dan sekadar bersandar pada kesadaran situasional masyarakat.

3. Belum Tersedianya SOP

Nihilnya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengakibatkan manajemen limbah di Desa Sumanggi kehilangan arah akibat absennya regulasi kerja yang baku, legal, dan sistematis. Akibatnya, aparatur desa kerap bingung menyusun jadwal pengangkutan serta tarif iuran, sementara urusan sampah selalu dianaktirikan dalam penganggaran demi pembangunan

fisik. Tanpa acuan tertulis, operasional harian hanya bersandar pada instruksi lisan, kebiasaan lama warga membakar sampah, dan insting semata. Ketiadaan indikator keberhasilan ini memicu tumpang tindih peran, mengabaikan keselamatan kerja (APD), serta membuat pelayanan kebersihan berjalan tidak menentu dan tebang pilih.

SIMPULAN

Berdasarkan data komprehensif yang dihimpun selama proses investigasi mengenai tata kelola limbah domestik di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dapat dirumuskan beberapa simpulan strategis yang saling berkaitan. Pertama, manajemen penanggulangan sampah di wilayah tersebut dinilai belum berjalan secara optimal, yang terkonfirmasi melalui evaluasi mendalam terhadap empat subvariabel utama. Pada aspek perencanaan, agenda kerja dinilai kurang matang akibat belum tersedianya cetak biru operasional yang legal-formal, sehingga mekanisme kerja di lapangan masih bersifat tentatif dan sangat bergantung pada kepedulian individual warga. Kondisi ini diperparah oleh status *Standard Operating Procedure* (SOP) yang belum memadai lantaran absennya aturan tertulis dan ketetapan jadwal pengangkutan yang baku, yang berkombinasi dengan minimnya infrastruktur dasar sehingga penanganan harian terkesan darurat, acak, serta tidak konsisten. Beralih pada subvariabel pengorganisasian, pembagian beban kerja belum terealisasi secara profesional karena desa tersebut belum merekrut tenaga kebersihan khusus untuk memegang kendali penuh, yang pada akhirnya memicu kaburnya batasan peran antara birokrasi desa, pengelola, dan masyarakat. Kelemahan ini linier dengan status struktur kepengurusan yang belum formal dan tidak terarah, sehingga eskalasi problem sampah di kawasan permukiman luas menjadi terbengkalai. Selanjutnya, dari segi pelaksanaan, jangkauan pelayanan kebersihan masih sangat sempit akibat keterbatasan logistik yang hanya mengandalkan seratus unit wadah sampah dan satu armada roda tiga (Viar), bersanding dengan defisit jumlah personel di lapangan. Indikator akselerasi program pun stagnan akibat belum terbangunnya sistem yang padu serta lemahnya komitmen kolektif antara aparatur desa dan warga dalam mewujudkan zonasi lingkungan yang higienis. Sementara itu, pada kluster pengawasan, fungsi kontrol terhadap efisiensi kerja tergolong lemah karena ketiadaan skema evaluasi berkala, ditambah lokus supervisi yang masih parsial di area balai desa dan fasilitas peribadatan saja. Meski demikian, respons psikologis dan perilaku kolektif masyarakat menunjukkan sinyal positif yang ditandai oleh tingginya antusiasme warga dalam agenda kerja bakti massal, walaupun konsistensi harian masih diuji oleh segelintir penduduk yang masih membuang limbah ke bantaran sungai, melakukan pembakaran terbuka, serta menumpuk sampah secara sembarangan.

Kedua, terdapat stimulasi dari beberapa faktor determinan yang secara signifikan menghambat efektivitas sistem pembuangan akhir di Desa Sumanggi. Faktor krusial pertama berakar pada minimnya fasilitas sanitasi utama, seperti nihilnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS), keterbatasan armada pengangkut, dan kelangkaan tempat sampah publik yang dipicu oleh benturan alokasi dana desa yang lebih memprioritaskan sektor pembangunan infrastruktur fisik. Faktor pembatas kedua adalah belum adanya formasi pekerja kebersihan internal yang didedikasikan untuk menyisir seluruh area hunian masyarakat, yang mengakibatkan aktivitas sterilisasi lingkungan bergerak sektoral dan sepenuhnya bertumpu pada inisiatif swadaya warga. Faktor penghambat ketiga bermuara pada ketiadaan dokumen SOP atau regulasi hukum lokal yang mengikat, sehingga memicu ketidakpastian operasional, tumpang tindih pembagian tugas, serta rendahnya posisi tawar isu lingkungan hidup dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Akumulasi dari kerumitan sistemik ketiga faktor tersebut pada akhirnya mendorong masyarakat setempat untuk mengambil jalan pintas yang destruktif bagi ekosistem, seperti membakar timbunan sampah di sekitar pekarangan rumah serta membuangnya ke lahan kosong dan aliran sungai, yang secara ekologis berpotensi besar memicu bencana banjir bandang serta penyebaran vektor penyakit berbahaya di lingkungan pemukiman.

DAFTAR PUSTAKA

Azmin, N., Irfan, I., Nasir, M., Hartati, H., & Nurbayan, S. (2022). Pelatihan pembuatan pupuk kompos dari sampah organik di Desa Woko Kabupaten Dompu. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1*(3), 195–199.

Emilson, N. H., Okpirianty, R., Kasra, H., Ardha, D. J., Herudiansyah, G., Rani, F. H., & Qosim, S. (2023). Kebijakan pengelolaan sampah bernilai ekonomi di Desa Tanjung Atap Barat Ogan Ilir. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks, 11*(1).

Hajji, A., Rizal, M., Sugandi, M., & Ariestadi, D. (2024). Perancangan bangunan instalasi pengolahan sampah terpadu (TPST) kawasan wisata Pantai Gemah Tulungagung. *Jurnal Karinov, 7*(1), 8–14.

Hakikiah, N. N. (2024). Bank sampah sebagai strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 5(2),

Kahfi, A. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 4*(1), 12–25.

Mahyudin, R. P. (2017). Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di Kota Banjarbaru. *Jurnal Teknik Lingkungan, 3*(1), 66–74.

Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.

Nasihin, I., Nurdin, N., Yuhandra, E., Alpiyah, L. N., & Rachmat, N. A. (2023). Peningkatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa dalam teknik penyusunan peraturan desa pengelolaan sampah rumah tangga. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6*(2), 178–183.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Sandika, I. K. B., Ariasih, N. K., Sutarwiyasa, I. K., Lesmana, P. S. W., Ginantra, N. L. W. S. R., Widiartha, K. K., Indrawan, I. G. A. (2022). PKM optimalisasi pengelolaan sampah melalui pemilahan pada sumber timbulannya di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi, 1*(4), 88–96.

Sururi, A. (2018). Collaborative *governance* sebagai inovasi kebijakan strategis. *Humanika, 25*(1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Wafa, A., & Angin, R. (2024). Formulasi kebijakan program Banyuwangi Hijau dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *Jurnal Pemerintahan dan Politik, 9*(1), 1–14.

Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Ristya, W. (2020). Pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce*, *Reuse*, *Recycle*) dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 4*(2), 120–130.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.